

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA KOTA BATU DALAM
MELAKUKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG
PERTANIAN
(Studi Literasi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh :
Jestan Rupendi Selan
NIM. 2013210054

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2021**

RINGKASAN

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 195) mengatakan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat sekelompok pemerintah agar tercapai suatu tujuan dan suatu keputusan kebijakan adalah implementasi kebijakan. didalam proses implementasi kebijakan apabila sasaran dan tujuan tepat sasaran dan kegiatan tersusun dan mencapai sasaran . suatu peraturan undang-undang yang diatur oleh DPRD kabupaten dan sudah disetujui oleh kepala daerah yaitu bupati atau walikota sesuai pasal 1 angka 8 UU no 12 tahun 2011 merupakan perda Kabupaten / Kota.wujud nyata .dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dipunyai PEMDA dan didasari oleh PERDA jabaran dari peraturan undang-undang yang tinggi dengan cara melihat ciri khas dari masing-masing daerah. didalam proses membahas rancangan PERDA yang hakikat pada arah suatu musyawarah agar tercapainya mufakat. Di Dalam membahas rancangan PERDA tidak sisakan ruang pada voting karena kedudukan antara legislatif dan PEMDA sederajat. tiap bahasan rancangan PERDA dikehendaki dengan kesepakatan Bersama agar masing-masing pihak mempunyai suatu kedudukan yang memang seimbangdan tidak mungkin suatu keputusan diambil pada pemerintah pada provinsi dan gubernur pada perda Kabupaten.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan Perda, Pemberdayaan Masyarakat pertanian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara yang dalam proses berkembang dan mempunyai kesejahteraan rakyatnya berbeda adalah Negara Indonesia. Kaitan problem kesejahteraan rakyat dikaitkan dengan banyaknya penduduk yang miskin. ini adalah tantangan besar pemerintah untuk tingkatkan suatu kesejahteraan di negara ini .kekurangan dalam kehidupan memang keadaan dan tidak bisa dihindari lagi oleh orang adalah arti dari kemiskinan menurut BAPPENAS. Selanjutnya masalah yang terjadi dan tidak dapat dihindari dari berbagai negara adalah kemiskinan. Dari tahun ketahun sesuai data yang diperoleh BPS angka kemiskinan di negara Indonesia mengalami suatu penurunan karena angka kemiskinan yang sangat tinggi.

Pemerintah membantu masyarakat dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberikan subsidi. Dalam rangka meningkatkan perekonomian, pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada beberapa perusahaan. Pemerintah memberikan subsidi untuk memudahkan masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok seperti pangan, minyak, telur, bahan bakar minyak, dan lain-lain. Pemerintah memberikan subsidi untuk makanan dan perumahan. Pemerintah mensubsidi banyak rumah murah. Subsidi ini akan membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak, yang akan membantu melestarikan undang-undang zonasi yang ada untuk wilayah tersebut. Jika orang miskin dibiarkan tinggal di kota, maka tidak ada cukup ruang bagi kota untuk terlihat rapi dan bersih.

Ada beberapa bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah tidak dari hanya perumahan atau pangan tapi kesehatan maupun Pendidikan, memang Pendidikan

sangat penting dalam meningkatkan kualitas dari seseorang dan kesehatan juga sangat penting . dan apabila tubuh seseorang sehat otomatis semakin mengat dalam meningkatkan kualitas hidupnya, seperti menambah pengetahuan atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada beberapa program yang dibuat oleh presiden Jokowi yaitu kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar.

Masyarakat yang tinggal di Kota Batu sebagian besar bertani. Pemerintah selalu dilibatkan dalam program pemberdayaan rakyat di bidang Tani. Berdasarkan jumlah penduduk di Desa Sumber Brantas Bumiaji Kota Batu yang menjadi sasaran penelitian kami, maka penting untuk membahas cara efektif membantu masyarakat petani. Cara yang dapat kita lakukan untuk membantu masyarakat miskin di daerah ini adalah untuk menyadari bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling penting adalah dorongan pemerintah pada masyarakat.

Pemerintah kota Batu juga selalu berupaya membuat kebijakan-kebijakan agar masyarakat Kota Batu bisa sejahtera. Dibuktikan oleh pemkot Batu yang turnkan angka kemiskinan di indo. Sekitar 3100 KK yang alami kemiskinan , kini jadi 2.656 KK yang sisa. Maka dari itu , pemerintah di kota batu lepas status 444 KK warga yang alami kemiskinan catatan data pada akhir november. Selanjutnya menurunnya angka ini, kami akan terus berinovasi demi pengentasan warga miskin di Kota Batu, kata Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso. Menambahkan, Pemkot Batu melalui Dinas Ketahanan Pangan memberikan raskin (beras untuk warga miskin) khusus untuk masyarakat miskin yang tidak tercover (BPNT) dan (PKH).Sebelumnya pemkot memberi bantuan berupa beras 5 KG.dan ada penambahan 10 kilogram. Ini adalah cara pemerintah memberi orang yang

membutuhkan bantuan dengan hal-hal tertentu. Walikota Batu mengatakan angka kemiskinan (Kota Batu) terus menurun dari tahun-tahun sebelumnya. “Ini salah satu upaya Pemkot Batu untuk memberikan bantuan. Mulai dari ketersediaan lapangan kerja dan program bantuan bagi masyarakat miskin”, ujarnya. Kehadiran tempat wisata menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan baru. Bisnis adalah bagian dari masyarakat kita. Mereka juga tumbuh dan berubah. Pemerintah Kota Batu punya banyak uang. Mereka menggunakan uang ini untuk membantu lebih dari sekedar orang-orang yang tinggal di sana.

Berdasarkan UU no 6 tahun 2014 tentang desa , Desa memiliki kesempatan untuk memperbaiki tata kelola dan rencana pembangunannya sendiri. Memberi orang-orang di komunitas pedesaan kekuatan untuk memutuskan masa depan mereka sendiri adalah penting. Dewasa ini, hal itu dilakukan dengan cara tingkatkan pengetahuan perilaku,keterampilan,sikap,kesadaran, dan kemampuan serta pendamping. Pembangunan bangsa dan daerah tidak terlepas dari pembangunan desa. Pemerintah perlu memberikan banyak perhatian kepada desa yang menjadi basis kekuatan sosial dan politik. Perencanaan pembangunan menjadikan desa sebagai sasaran pembangunan, bukan subyek pembangunan. Ide kemandirian dimana program-program dalam membangun secara system adalah ide yang muncul dalam pemberdayaan(Gleydis Susanti).

Sesuai permendagri RI Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, bahwa ini merupakan untuk tingkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup rakyat di desa. Masyarakat desa menjadi lebih mandiri dengan tingkatkan suatu keterampilan ,pengetahuan, kesadaran serta kemampuan dan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan perubahan yang perlu dilakukan di

desa. Desa akan lebih mandiri melalui pemberdayaan masyarakatnya. Desa telah berubah dalam banyak hal. Dengan demikian desa dapat diperdaya agar terlindungi, mandiri, maju, kuat, sejahtera dan demokratis, serta memberikan dasar yang kokoh bagi terselenggaranya PEMDES yang adil dan makmur

Sesuai UU NO 6 tahun 2014, desa diberi jalan yang mandiri dan posisikan desa sebagaimana mestinya.

Lembaga utama yang menjalankan negara adalah pemerintah. Dengan program pemerintah yang dijalankan semakin baik otomatis rakyat akan semakin sejahtera. (Abdul Rajak). Mata pencaharian penduduk Kota Batu tidak banyak berubah, karena penduduk memanfaatkan lahan yang ada dan menghasilkan produk pertanian. Permasalahan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kesejahteraan masyarakat adalah dari sumber daya manusia dan pembangunan. Pembangunan suatu negara atau daerah merupakan bagian dari pembangunan di desa. di Kota Batu banyak program pemerintah di bidang pertanian, dan masih dibutuhkan,

Pemerintah membantu masyarakat desa Brantas dengan memberdayakan hal-hal baru, seperti membangun, agar dapat membantu mereka berkembang dengan baik. Demikian pula pemerintah desa berperan bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat desa Sumber Brantas. Pembangunan pedesaan harus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan agar hidup lebih baik dan mengubah cara anggota masyarakat berperilaku Ita Ulumiyah 2013 (Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa). Dalam melakukan suatu program yang dijalankan pemerintah Desa untuk berdayakan rakyat desa.

pemerintah Desa Sumber Brantas ada yang mengalami kendala dalam pembangunan, yang dalam masyarakatnya kehidupan masih serba terbatas atau menengah kebawah, pendapatan ekonomi dalam pertanian.maka dari itu judul penelitian yaitu. “Implementasi Kebijakan Perda Kota Batu Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian ”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Perda Kota Batu dalam memberdayakan masyarakat di bidang pertanian?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Perda Kota Batu dalam memberdayakan masyarakat di bidang pertanian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda Kota Batu dalam memberdayakan masyarakat di bidang pertanian.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Perda Kota Batu Dalam memberdayakan masyarakat di bidang pertanian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang dijadikan bahan referensi maupun sebagai pembandingan bagi peneliti yang akan melakukan dan atau sudah dilakukan serta menambah pengetahuan terkait dengan judul peneliti.
2. Bagi Instansi, dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait Implementasi kebijakan Perda Kota Batu dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian.

3. Bagi masyarakat, dapat dijadikan wawasan tentang Implementasi Perda Kota Batu Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rajak Abdjul. 2013. (Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Jagung) Jurnal.
- Agustino Leo, Dasar –Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2008
- Ali Mustafa Kamal. 2013. Penggunaan Metode RolePlaying Berbantuan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas IVB SDN Gisikdrono 03 Semarang. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Antonius Richardo Ratu Da Costa pada tahun 2017 (Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)
- Anwas, M. Oos. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta.
- Astuti, Hermawan dan Rozikin. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi Pada Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 11, Hal. 1886-1892
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2017. Kota Batu Dalam Angka 2017. (Online), (<http://batukota.bps.go.id/>).
- BAPPEDA Kota Batu. 2017. Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah Daerah Kota Batu
- Duverger, Maurice. 2010. Sosiologi Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gleydis Susanti Oroh. 2014 (Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Lagowan Barat Kabupaten Minahasa) Jurnal.
- Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia
- Herry, W. S. 2006. Swasembada Pangan dan Pertanian Berkelanjutan Tantangan Abad Dua Satu Pendekatan Ilmu Tanah Tanaman dan Pemanfaatan IPTEK

- Nuklir. Badan Tenaga Nuklir Nasional, Tangerang. Indonesia, Bogor, 2002.
- Kurniawan dan Maani. 2019. Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP). Volume 1 Nomor 4. ISSN : 2684-818X (Online), ISSN : 2338-7378 (Print), <http://jmiap.ppj.unp.ac.id>
- Iskandar Wiryokusumo dalam Afrilianasari, 2014. Teori Pengembangan, Surabaya
- Ita Ulumiyah. 2013 (Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa) Jurnal.
- J.Moleong, Lexy.2014. Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Juliartha, Edward. 2009 (Model Implementasi Kebijakan Publik) Jakarta: Trio Rimba Persada
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato.(2013) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Presektif Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta.
- Mindart Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindart Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1995. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta : Edisi Ke-Tiga.LP3S.
- Muda'i 2017 (Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Dibidang Objek Wisata (Studi Pada Wahana Wisata De Berran di Desa Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu).
- Obot dan Setyawan.2017.Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan.JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISSN.2442-6962 Vol. 6, No. 3.Hal : 113 – 120
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Kota Batu Provinsi Jawa Timur

- Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 1 angka 13 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Pramono, Sugeng. 2018. Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2017 – 2022. Kota Batu : Disperta Kota Batu
- Pramono, Sugeng. 2019. Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kota Batu Tahun 2018. Kota Batu : Disperta Kota Batu
- Punaji Setyosari.2013.Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan.Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- Puspito dan Rahmawati. 2015. Faktor – Faktor yang Berpengaruh terhadap Pengembangan Kawasan Agrowisata melalui Pendekatan Community Based Tourism di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. JURNAL TEKNIK ITS Vol. 4, No. 2, (2015) ISSN: 2337-3539 (2301-9271)
- Salikin. 2003. Sistem Pertanian Berkelanjutan. Yogyakarta. Kanisius.
- Soekanto. 2002 . Sosiologi Untuk Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang : Setara Press
- Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim.(2007) Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah https://ppid.batukota.go.id/ppid_pembantu/profil/badan-perencanaan-pembangunan-penelitian-dan-pengembangan-daerah
- Warsita, Bambang. 2008. Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya.Jakarta: Rineka Cipta